

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Zaka Firma. "Judicial Consistency Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Undang-Undang Penodaan Agama." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 81–103.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Yogyakarta: Gava Media, 2006.
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2016): 217–36.
- Akbar, Kemas Ilham, Elfrida Ratnawati Gultom, Dhany Rahmawan, Novina Sri Indirahati, and Simona Bustani. "Teori Hukum Pembangunan Antara Das Sein Dan Das Sollein." *Ensiklopedia of Journal* 7, no. 2 (2025): 169–80.
- Akmaluddin, Muhammad Addres. "Problematisa Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." Universitas Islam Indonesia, 2025.
- Al'anam, Muklis, and Sabrena Sukma. "Possessioj Of Evidence Peradilan Hubungan Industrial (Studi Gagasan Pembalikan Beban Pembuktian)." *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik* 6, no. 3 (2024): 552–64.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Anna Triningsih, and Nuzul Qur'aini Mardiya. "Interpretasi Lembaga Negara Dan Sengketa Lembaga Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 779–98.
- Aries, Albert. *Hukum Pembuktian Teori, Asas Dan Yurisprudensi (Dalam Perkara Pidana, Perdata, TUN Dan Konstitusi)*. Depok: Raja Grafindo Perkasa, 2022.
- Arizona, Yance. "Legal Policy of President Joko Widodo and the Independence of Constitutional Court: Politik Legislasi Presiden Joko Widodo Dan Independensi Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 1 (2024): 35–61.
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1*. Vol. 1. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2006.

- . *Pengujian Formil Undang-Undang Di Negara Hukum*. Jakarta: Konsititusi Press, 2020.
- Atina, Siti Thali'ah, Eddy Purnama, and Efendi. "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 466–77.
- Auliya, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–85.
- Barnett. *Restoring The Lost Constitution: The Presumption of Liberty*. Princeton University Press, 2014.
- Bar-Siman-Tov, Ittai. "The Puzzling Resistance to Judicial Review of the Legislative Process." *BUL Rev.* 91 (2011): 1915.
- Bawembang, Nopesius. "Beban Pembuktian Dan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Lex Administratum* 7, no. 4 (2019).
- Bone, Robert G. "Modeling Frivolous Suits." *University of Pennsylvania Law Review* 145, no. 3 (1997): 519–605.
- Busroh, Firman Freaddy, and Fatria Khairo. *Varia Teori Hukum Kontemporer*. Badung: Infes Media, 2024.
- Center, Indonesian Parleмент. *DPR RI Tidak Efektif Dalam Mewakili Rakyat*. Jakarta: Indonesian Parleмент Center, 2024. <https://ipc.or.id/pers-rilis-dpr-ri-tidak-efektif-dalam-mewakili-rakyat/>.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- . "Membuktikan Dalil Dalam Pengujian Formil." *Hukum Online*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/membuktikan-dalil-dalam-pengujian-formil-lt6852f1fd2b131/>.
- CNN. "IPC Beber Kemirisan Keterbukaan Informasi Dari 731 Rapat DPR Tahun Ini." CNN Indonesia, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250903131112-32-1269674/ipc-beber-kemirisan-keterbukaan-informasi-dari-731-rapat-dpr-tahun-ini>.
- Corrales, Javie. "The Authoritarian Resurgence: Autocratic Legalism in Venezuela." *Journal of Democracy* 26 2 (2015): 37–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.1353/jod.2015.0031>.

- Effendy, Marwan. "Pembalikan Beban Pembuktian Dan Implementasinya Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, no. 1 (2009): 1–13.
- Erlangga. "KEKUATAN AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PADA PERKARA SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN." *Jurnal Nalar Keadilan* 5, no. 1 (2025).
- Faiz, Pan Mohamad. "Khitah Pemberi Keterangan Di MK." *Majalah Konstitusi*, 2019.
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, and Moch. Juli Pudjioo. *FILSAFAT HUKUM; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*. 1st ed. Solo: Kafilah Publishing, 2018.
- Faruq, Muhammad Hamzah Al. "Dinamika Dan Problematika Praktik Pembuktian Pengujian Formil An Sich Di Mahkamah Konstitusi." Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Fatoni, Arif Widi. "REKONSTRUKSI HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK KORUPSI DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN BIROKRASI BERBASIS NILAI Keadilan Pancasila." Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Fazrie, Nurul, and Bivitri Susanti. "Tantangan Pengujian Proses Legislasi Di Mahkamah Konstitusi." Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, 2020. <https://www.jentera.ac.id/publikasi/tantangan-pengujian-proses-legislasi-di-mahkamah-konstitusi>.
- Firdaus, Muhammad Taufiq. "Urgensi Paradigma Legisprudence: Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara: The Urgency of the Legisprudence Paradigm: The Practice of Abusive Legislation in the Revision of the State Ministry Law." *JAPHTN-HAN* 4, no. 1 (2025): 45–64.
- Fitriani, Evi, Ahmad Ahsin Thohari, and Irsyaf Marsal. "Transformasi Paradigma Kebijakan Publik: Integrasi Prinsip Hukum Progresif Dalam Pembangunan Hukum Responsif Di Indonesia." *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 5, no. 2 (2025): 875–88.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Peran Mahkamah Konstitusi Mencegah Gejala Autocratic Legalism Di Indonesia The Role of Constitutional Court to Prevent Autocratic Legalism in Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 741–65.

- Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. 1st ed. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamowy, Ronald. "Presumption of Liberty." *Sage Publications*, 2008, 300. <https://doi.org/doi:%20https://doi.org/10.4135/9781412965811.n181>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Harijanti, Susi Dwi, Lailani Sungkar, and Wicaksana Dramanda. *Laporan Hasil Penelitian Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Universitas Padjajaran, 2020.
- Hatta, Muhammad, Yoslan K. Koni, Fahri Bachmid, Nasrun Hipan, and Hardianto Djanggih. *Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Delik Korupsi Di Indonesia*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2020.
- Herlina, Sri, Lutfi Yusup Rahmathoni, Sudiyono, and Macario G. Gayeta. "Application Of The Principle Of Reverse Burden Of Proof In The Criminal Justice System In Money Laundering Cases In Indonesia." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (n.d.): 1–23.
- Hiariej, Eddy Omar Sharif. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jogjakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hoffman, Lonny Sheinkopf. "Access to Information, Access to Justice: The Role of Presuit Investigatory Discovery." *University of Michigan Journal of Law Reform* 40, no. 2 (2006): 217–80.
- Huda, Ni'matul, and Riri Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusamedia, 2017.
- Hutabarat, Dany Try Utama. "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *SANKSI* 4, no. 1 (2025): 274–83.
- Indonesian Corruption Watch. "Polemik Revisi UU TNI: Sudah Saatnya Pembahasan UU Sembunyi-Sembunyi Dihentikan." Jakarta: Indonesian Corruption Watch, 2025.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54–69.
- Islami, Sultan Reza, and Sidi Ahyar Wiraguna. "Ketidakseimbangan Pembuktian Dalam Perselisihan Hasil Pemilu Di Mahkamah Konstitusi: Antara Hukum Dan Kepentingan Politik." *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2025): 122–32.

Jayidsoh, Josua James. "Kekuatan Hukum Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2025.

Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. "Judicial Review Di Amerika Serikat, Jerman, Dan Indonesia." *Jurnal Progresif* 8, no. 1 (2020): 67–80.

Kamis, Margarito. "Tinjauan Teoritik Kemandirian Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Ketatanegaraan* 4 (2017): 93–122.

Kartika, Mimi. "Pemerintah Enggan Beri Keterangan Dalam Sidang Pengujian UU Desa." Mahkamah Konstitusi, 2024. <https://www.mkri.id/berita/pemerintah-enggan-beri-keterangan-dalam-sidang-pengujian-uu-desa-21745>.

Keamanan, Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor. "DPR Tidak Serius Dan Meremehkan Sidang Mahkamah Konstitusi Tentang Pengujian Formil Revisi Undang-Undang TNI." Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia, 2025. <https://pbhi.or.id/dpr-tidak-serius-dan-meremehkan-sidang-mahkamah-konstitusi-tentang-pengujian-formil-revisi-undang-undang-tni/>.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (Diterjemahkan Oleh Raisuk Muttaqien)*. Bandung: Nusa Media, 2011.

Konstitusi, Mahkamah. "Putusan Mahkamah Konstitusi." Mahkamah Konstitusi, 2025. <https://www.mkri.id/perkara/persidangan/putusan>.

Kurnia, Dwi. "Minimnya Transparansi Dan Aksesibilitas Risalah Masih Menjadi Permasalahan DPR." Indonesian Parliamentary Center, 2023. <https://ipc.or.id/minimnya-transparansi-dan-aksesibilitas-risalah-masih-menjadi-permasalahan-dpr/>.

Kurniarullah, Muhammad Rizki, Hotmauli Silalahi, Talitha Nabila, and Dewi Haryanti. "Abusive Law Making Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 22503–12.

Kusmayanti, Hazar. "Problematika Pembuktian Terbalik Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Indonesia." *Lex Jurnalica* 17, no. 2 (2020): 132–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/lj.v17i2.3282>.

Lagi, Sara. "Hans Kelsen and the Austrian Constitutional Court." *Revista Co-Herencia* 9, no. 16 (2016): 273–95.

Listyowati, Rina. "Implementasi 'Pembalikan Beban Pembuktian' Terhadap Harta Yang Belum Didakwakan Dalam Perkara Penggabungan Tindak Pidana

Korupsi Dan Tindak Pidana Pencucian Uang.” Universitas Islam Indonesia, 2017.

Lubis, Muhammad Kenan. “Rekonstruksi Hukum Kewenangan Pelaksanaan Deponaring Dalam Kaitannya Dengan Asas Opportunitas Oleh Kejaksaan Berbasis Nilai Keadilan.” Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Luviana, Ervin, Rossella Arylia Tiara Simanjuntak, and Zainab Nainawa. “Penguatan Prinsip Due Process Of Lawmaking Melalui Reformulasi Pengaturan Uji Formil Undang-Undang Dengan Mekanisme Reversal Burden Of Proof Secara Berimbang (Studi Perbandingan Indonesia Dan Jerman).” *Journal of Studia Legalia* 6, no. 1 (2025).

Mahardika, Ahmad Gelora. “Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Atas Transportasi Online Di Era Disrupsi.” *Diversi: Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2020): 196–219.

Mahendrawati, Yunita. *Inkonsistensi Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 Dan Putusan MK No. 22/PUU-XVII/2019 Terkait Peraturan Jabatan Notaris*. (Bali) 4, no. 3 (2019): 452–64.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Risalah Sidang Perkara Nomor 142/PUU-XXII/2024 Perkara Nomor 161/PUU-XXII/2024 Perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pengujian Materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun.” Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2025.

Mainake, Yosephus. “Uji Formil UU KPK Oleh Mahkamah Konstitusi.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI* 13, no. 21 (2021): 1–6.

Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Maulana, Muhammad Reza. “Upaya Menciptakan Produk Hukum Berkualitas Konstitusi Melalui Model Preventif Review.” *Jurnal Konstitusi* 15, no. 4 (2018): 775–95.

Mochtar, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Konstitusi Dan Diskursus Judicial Activitism vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Pers, 2021.

———. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok, 2022.

- Monita, Yulia, Andi Najemi, and Nys Arfa. "Urgensi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi: Urgensi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 7, no. 1 (2023): 40–57.
- MPR RI. "Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Badan Pengkajian MPR RI* 1 (2017): viii–251.
- Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. 1st ed. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.
- Murtadho, Nazhif Ali. "Bukti Ilegal Dalam RUU KUHAP Indonesia: Exclusionary Rules Dan Due Process of Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 25, no. 3 (2025): 291–308.
- Nafi' Mubarak. "KEADILAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2020): 336–69.
- Nainggolan, Marsudin. "Sistem Pembuktian Terbuka Dalam KUHAP Baru, Era Baru Peradilan Pidana Indonesia." November 2025. <https://dandapala.com/article/detail/sistem-pembuktian-terbuka-dalam-kuhap-baru-era-baru-peradilan-pidana-indonesia>.
- Negri, Stephania. "The Principle of 'Equality of Arms' and the Evolving Law of International Criminal Procedure." *International Criminal Law Review*, 5, 2005, 145–82.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Permatasari, Pita, I. Kadek Apdila Wirawan, and Sardiansyah Haerul Imam Sailallah. "Keyakinan Hakim Pada Alat Bukti Satu Saksi Perkara Perdata." *Iblam Law Review* 5, no. 2 (2025): 137–44.
- Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo. "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1–12.
- Prasetyo, Wawan. "Metode Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (2015): 472–520.
- Pratama, Nur Aji. "Meaningful Participation Sebagai Upaya Kompromi Idee Des Recht Pasca Putusan Mk No. 91/PUU-XVIII/2020." *Crepido* 4, no. 2 (2022): 137–47.

- Putra, Ilhamdi, and Beni Kharisma Arrasuli. "Uncertainty of Procedural Law Practices and Variation in Decisions of Judicial Review of Legislative Process (Ketidakpastian Praktik Hukum Acara Dan Variasi Amar Putusan Pengujian Formil)." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 2 (2025): 380–97.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XII/2014 (2014).
- Rafli Fadilah Achmad. "Urgensi Batas Waktu Penyelesaian Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Universitas Indonesia, 2018.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press, 2006.
- . *Hukum Dan Perilaku; Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.
- . *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- . "Reformasi Menuju Hukum Progresif." *Unisia* 27, no. 53 (2004): 238–41.
- . *Sosiologi Hukum : Esai-Esai Terpilih Hukum : Esai-Esai Terpilih*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rasji and Harry Harmono. "PROBLEMATIKA PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN DI MASYARAKAT." *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–19.
- Retno Mawarini Sukmariningsih. "Arti Pentingnya Keterangan DPR Dan Presiden Dalam Proses Uji Materi Undang-Undang." *Yustisia* 2, no. 3 (2013): 127–36.
- Reumi, Frans, Loso Judijanto, Kiki Kristanto, Dian Rahadian, and Erni Yoesry. *Teori Hukum: Konsep, Aliran, Dan Penerapan*. Jambi: Sonpedia, 2025.
- Rhiti, Hyronimus. "Landasan Filosofis Hukum Progresif." *Justitia Et Pax* 32, no. 1 (2016): 33–51.
- Rishan, Idul. "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2022): 43–67.
- . "Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (2021): 1–21.

- Roberts, Cristhoper. "Reversing the Burden of Proof before Human Rights Bodies." *The International Journal of Human Rights* 25, no. 10 (2021): 1682–703.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1859486>.
- Sa'ari, Maya Herma, Cika Artika, Rangga Koesoemah, and Fathurrahman Nursaid. "Teori Alamiah Dalam Pandangan John Locke." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2022): 1–25.
- Safa'at, Muchammad Ali, Agus Riewanto, Pan Mohamad Faiz, Abdul Ghoffar, Andriani Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, Bayu Dwi Anggono, Bisariyadi, Helmi Kasim, and Luthfi Wigdagdo Eddyono. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya, 2017.
- Safudin, Endrik, Achmad Baihaqi, Ahmad Syakirin, Anjar Kususiyanah, and Anis Hidayati Imtihanah. *Memahami Teori Hukum Percikan Pemikiran Ilmu Hukum Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Q-Media, 2022.
- Sahbani, Agus. "Pendapat Ahli Soal Pengujian Formil Di Sidang Uji UU Minerba." *Hukum Online*, 2021.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-ahli-soal-pengujian-formil-di-sidang-uji-uu-minerba-lt60af19f596ad9/>.
- Sari, Jingga Dian Eka Rindra, and Rizal Maula. "Model Pembuktian Dalam Putusan Kabul Mahkamah Konstitusi: Studi Kasus Sengketa Pemilu Legislatif No. 86-03 26/PHPU. DPR. DPRD/XVII/2019." *Jurnal Konstitusi & Demokrasi* 3, no. 2 (n.d.): 5.
- Saria, H. Erli. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Demokratis." *Doctrinal* 1, no. 1 (2016): 1–18.
- Satria, Hariman. *Hukum Pembuktian Pidana Esensi Dan Teori*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- . "Ke Arah Pergeseran Beban Pembuktian." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 3, no. 1 (2017): 87–114.
- Sauni, Herawan, Putra Perdana Ahmad Saifulloh, Sonia Ivana Barus, and David Aprizon Putra. "Peran Analisis Hukum Dalam Pembentukan Naskah Akademik Undang-Undang Partisipatif Guna Mencegah Abusive Legislation: Studi Evaluasi Rancangan Undang-Undang Penyiaran." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 13, no. 3 (2024).

- Setiawan, Peter Jeremiah. "Sistem Beban Pembuktian Dinamis (Dynamic Burden of Proof): Paradigma Kebijakan Kriminal Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 2 (2019): 99–118.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Sinaga, Lestari Victoria, Alvi Syahrin, M. Hamdan, and Dedi Harianto. "Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Gratifikasi ,." *USU Law Journal* 4, no. 2 (2016): 90–97.
- Siregar, Mardona. "Teori Hukum Progresif Dalam Konsep Negara Hukum Indonesia." *Muhammadiyah Law Review* 8, no. 2 (2024).
- Soetama, Hendar. *HUKUM PEMBUKTIAN DALAM ACARA PIDANA*. Bandung: Alumni, 2023.
- Sofwan, Haeruman Jayadi, and Rusnan. "Kejelasan Perumusan Norma Dalam Pembentukan Undang-Undang (Kajian Terhadap Penggunaan Frasa Hukum Dalam Perumusan Norma Undang-Undang)." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 2 (2021).
- Stefin, Adie Marthin. "Perbandingan Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Perkara Perdata Dan Perkara Pidana." *Jurnal Kenotariatan Narotama* 1, no. 1 (2019): 12–24.
- Subroto, Agus. *Dasar Filosofis Pembalikan Beban Pembuktian (Shifting Burden Of Proof) Dalam Perkara Haki*. Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2025.
- Suhandi, Dadang, Uu Nurul Huda, and Utang Rosidin. "Politik Legislasi: Studi Terhadap Kepentingan Politik Dalam Penetapan Regulasi Di Indonesia." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024): 22–33.
- Sulaiman, King Faisal. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Suparto. "Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam." *Hukum Islam* 19, no. 1 (2019): 134–49.
- Suteki, Suteki. "Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum." *Crepido* 4, no. 2 (2022): 161–70. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.161-170>.
- Tauda, Gunawan A. "Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 31, no. 2 (2024): 358–83.

- Team, Wex Definition. "Shifting the Burden of Proof." Cornell Law School, 2025. https://www.law.cornell.edu/wex/shifting_the_burden_of_proof.
- Trinanda, Desip. "Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Ditolak." Universitas Andalas, 2025.
- Vincentius Patria Setyawan. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 120–35.
- Wahyono, Bambang Angkoso. "Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori, Dan Oigmaik Hukum." *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 1–12.
- Waldron, Jeremy. "Representative Lawmaking." *Boston University Law Review* 89, no. 2 (2009): 335–55. <https://doi.org/10.4159/9780674970342-006>.
- Whelan, Edward. "The Preseumption of Constitutionality." *Harvard Journal of Law and Public Policy* 42, no. 1 (2019): 17–22.
- Wicaksono, Adhitya Sandy. "Perbandingan Kontrak Sosial John Locke Dan Thomas Hobbes." *ADALAH* 6, no. 2 (2022): 89–97.
- Widiastuti, Retno, and Ahmad Ilham Wibowo. "Pola Pembuktian Dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, 2021.
- Yosephus Mainake. "Polemik Kewenangan Uji Formil Di Mahkamah Konstitusi." *Info Singkat* 8, no. 21 (2021): 1–6.
- Yulian, Topan Pratama. "Pembuktian Terbalik Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Sebagai Upaya Penegakan Konstitusionalitas Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang." *Indonesia of Journal Business Law* 4, no. 1 (2025): 131–43.
- Yusuf, Asep Warlan. "Hukum Dan Keadilan." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2015): 1–13.
- Yuwandhana, Agista. "Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara." *Jurnal Education and Development* 10, no. 3 (2022): 104–10.
- Zahra, Khansa Laily Az, Moh Fadwa Mufid Al Amjad, Syafa Nabya Maulidian, Septiani Silvia, and Fadilla Azfa Asyifa. "Relevansi Kepentingan Alat-Alat Bukti Dalam Proses Penyelesaian Hukum Perdata." *The Juris* 8, no. 1 (2024): 95–104.